



## Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



# Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah Anak di Kabupaten Kudus: Studi Kuantitatif tentang Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar

Andita Ratih<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Bappeda Kabupaten Kudus

✉ [andita.ratih@gmail.com](mailto:andita.ratih@gmail.com)

### Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Kebijakan Sosial,  
Ketimpangan Spasial,  
Pendidikan Anak, Putus  
Sekolah, Kudus.

Keywords:

Child Education,  
Kudus, Poverty, School  
Dropout, Social Policy,  
Spatial Inequality.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kudus dengan pendekatan kuantitatif-spasial. Berdasarkan data sembilan kecamatan tahun 2024, dilakukan uji korelasi Pearson dan regresi linier sederhana untuk mengukur kekuatan dan kontribusi hubungan antarvariabel. Hasil menunjukkan korelasi positif signifikan antara kemiskinan dan putus sekolah ( $r = 0,71$ ;  $p < 0,05$ ), serta 50,2% variasi angka putus sekolah dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan antarwilayah ( $R^2 = 0,502$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya akibat kondisi rumah tangga, tetapi juga refleksi dari distribusi spasial kemiskinan, infrastruktur pendidikan, dan efektivitas intervensi sosial. Wilayah perbatasan seperti Dawe dan Undaan mengalami tingkat kemiskinan dan putus sekolah tertinggi, serta kesenjangan layanan pendidikan formal. Penelitian ini mengungkap keterbatasan program afirmatif nasional seperti PIP dan PKH yang belum responsif terhadap risiko spasial lokal. Pendekatan spasial berbasis data terbukti krusial untuk perencanaan pendidikan yang inklusif dan adil. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam desain kebijakan perlindungan pendidikan anak berbasis wilayah.

### Abstract

*This study examines the link between poverty and junior high school dropout rates in Kudus Regency using a spatial-quantitative approach. Based on 2024 data, a significant positive correlation was found ( $r = 0.71$ ;  $p < 0.05$ ), with poverty explaining 50.2% of the dropout variation. Spatial analysis reveals higher dropout in peripheral districts with limited education access. Findings highlight the need for locally responsive social programs, as national schemes like PIP and PKH often overlook geographic disparities. The study underscores the value of spatially informed education planning to reduce structural inequality.*

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

## PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, negara memikul

tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan secara setara dan berkelanjutan (UNESCO, 2022).

Namun, pemenuhan hak pendidikan dasar di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks, terutama kemiskinan. Di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kudus, anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan dasar. Tidak terbatas pada wilayah, kemiskinan dan karakteristik keluarga merupakan penentu utama putus sekolah di masyarakat pedesaan Rumania (Nita, et al., 2021). Tekanan ekonomi memaksa sebagian anak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau mengalami keterputusan lingkungan belajar yang mendukung. Hal ini semakin diperparah oleh dampak panjang krisis ekonomi pasca-pandemi yang memukul sektor informal dan pedesaan (World Bank, 2021). Secara global, studi UNESCO (2022) menunjukkan bahwa anak-anak dari kelompok rumah tangga termiskin berisiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi untuk putus sekolah dibandingkan anak-anak dari rumah tangga menengah ke atas, terutama di negara-negara berkembang (UNESCO Institute for Statistics, 2022). Hal tersebut pun membentuk siklus intergenerasional kemiskinan dan pendidikan, di mana rata-rata tahun sekolah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Kevin, et al., 2022)

Berbagai program perlindungan sosial telah digulirkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa (DD), dan Program Indonesia Pintar (PIP), dengan tujuan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi pendidikan. Studi menunjukkan bahwa DD dan PIP memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan antara 2018–2021, termasuk di Kabupaten Kudus (Sari, 2020). Program PKH juga terbukti meningkatkan partisipasi sekolah pada anak penerima manfaat di berbagai wilayah Jawa Tengah (Mulyadi, 2022). Namun demikian, efektivitas program-program tersebut belum merata karena rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas lokal, serta akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas (Yuniarti, 2021; World Bank, 2021).

Meskipun secara hukum anak mencakup seluruh individu berusia di bawah 18 tahun, kebijakan pendidikan dasar dan sistem data sektoral di tingkat kabupaten secara operasional berfokus pada anak usia 7–15 tahun. Kelompok ini mencakup jenjang SD hingga SMP dan menjadi sasaran utama kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Fokus ini juga sejalan dengan ketersediaan data yang lebih sistematis dan termutakhir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di fase inilah, intervensi kebijakan memiliki potensi strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Secara empirik, data dari RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029 dan laporan Dinas Pendidikan menunjukkan kesenjangan spasial yang mencolok antara kecamatan. Kecamatan Dawe, Undaan, dan Mejobo memiliki tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah SMP tertinggi, sedangkan Kota Kudus dan Bae menunjukkan kondisi jauh lebih baik. Pola ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah SMP per Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2024

| No | Kecamatan  | Tingkat Kemiskinan (%) | Putus Sekolah SMP (%) |
|----|------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | Dawe       | 20.4                   | 4.3                   |
| 2  | Undaan     | 18.7                   | 4.0                   |
| 3  | Mejobo     | 17.2                   | 3.6                   |
| 4  | Jekulo     | 15.1                   | 3.2                   |
| 5  | Gebog      | 13.9                   | 2.1                   |
| 6  | Jati       | 12.5                   | 1.9                   |
| 7  | Kaliwungu  | 11.8                   | 1.5                   |
| 8  | Bae        | 10.2                   | 1.2                   |
| 9  | Kota Kudus | 9.4                    | 0.8                   |

Sumber: RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029; Dinas Pendidikan Kudus 2024–2025

Salah satu faktor struktural yang turut menjelaskan korelasi antara kemiskinan dan putus sekolah adalah mata pencaharian kepala keluarga. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa 41,3% rumah tangga miskin di Kudus menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian dan jasa informal, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, atau ojek daring—jenis pekerjaan dengan pendapatan tidak tetap dan minim perlindungan sosial (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2025). Ketergantungan pada sektor ini paling tinggi di Kecamatan Dawe dan Undaan, yang juga mencatat angka putus sekolah tertinggi. Sebaliknya, kecamatan seperti Jati dan Kota Kudus, yang didominasi oleh pekerja industri dan jasa formal, memiliki tingkat partisipasi sekolah yang lebih baik. Hal ini memperkuat temuan Umar dan Wicaksono (2021), serta Handayani dan Rachmawati (2020), bahwa ketimpangan pendidikan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi rumah tangga dan lokasi geografis (Handayani, 2020; Umar, 2021).

Berdasarkan publikasi Kudus dalam Angka tahun 2025, jumlah anak usia sekolah 7–15 tahun di Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 34.917 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000 anak berasal dari rumah tangga miskin yang terdata dalam DTKS. Namun demikian, angka partisipasi murni SMP secara keseluruhan masih berada pada kisaran 85,2%, masih jauh dari target RPJMD sebesar 95% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2025). Ini menunjukkan bahwa sebagian anak belum terjangkau secara efektif oleh intervensi sosial, sekaligus menandakan masih adanya kesenjangan geografis dan struktural yang belum diatasi oleh pendekatan kebijakan yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak di Kabupaten Kudus tahun 2024–2025. Dengan pendekatan kuantitatif dan data spasial antar-kecamatan, studi ini berupaya mengisi celah dalam literatur yang masih minim menyentuh aspek lokalitas dan efektivitas spasial dari intervensi kebijakan perlindungan sosial dalam menjamin hak pendidikan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak di Kabupaten Kudus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel numerik, serta menguji pengaruh kemiskinan sebagai faktor struktural terhadap keberlangsungan pendidikan dasar anak. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan relevansi pendekatan ini dalam menganalisis ketimpangan sosial dan akses pendidikan di wilayah berkembang (UNESCO Institute for Statistics, 2022; Handayani, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, dikumpulkan dari sejumlah sumber resmi daerah. Pertama, data tingkat kemiskinan per kecamatan diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 yang dipublikasikan melalui situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus. Kedua, angka putus sekolah tingkat SD dan SMP untuk tahun ajaran 2024–2025 diperoleh dari laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Ketiga, jumlah anak usia sekolah 7–15 tahun, yang berfungsi sebagai variabel kontrol demografis, diambil dari dokumen Kabupaten Kudus dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan kelompok usia ini mempertimbangkan kerangka wajib belajar sembilan tahun serta keterandalan data sektoral di tingkat daerah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sembilan kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Kudus. Fokus pada level kecamatan dimaksudkan untuk menangkap dinamika spasial dan ketimpangan antarwilayah secara lebih tajam, serta mengidentifikasi konsentrasi beban struktural yang dialami oleh anak-anak dari rumah tangga miskin. Ketimpangan ini relevan untuk dianalisis karena menunjukkan kemungkinan adanya bias spasial dalam distribusi intervensi sosial dan capaian pendidikan dasar.

Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi Pearson, dan regresi linier sederhana. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linier antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah, sedangkan regresi linier sederhana digunakan untuk mengestimasi besaran pengaruh kemiskinan terhadap angka putus sekolah antar kecamatan. Validitas data diperiksa melalui triangulasi lintas-sumber, dengan membandingkan konsistensi

antara dokumen RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029, data sektoral dari Dinas Pendidikan, dan statistik resmi dari BPS (Yuniarti, 2021).

Sebagai pelengkap, dilakukan pula analisis spasial sederhana dengan memetakan distribusi angka kemiskinan dan putus sekolah per kecamatan. Pemetaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi sebaran geografis ketimpangan serta mengkaji hubungan spasial yang mungkin tersembunyi di balik analisis numerik. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Handayani dan Rachmawati (2020) yang menekankan pentingnya perspektif geospasial dalam studi tentang ketimpangan pendidikan dasar di Indonesia (Handayani, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Statistik Anak dan Kemiskinan di Kudus**

Pemahaman terhadap dinamika pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks demografis dan sosial-ekonomi lokal yang melingkupinya. Kabupaten Kudus, sebagai wilayah dengan tingkat urbanisasi menengah di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi beban tanggungan pendidikan dasar yang signifikan. Berdasarkan data Kabupaten Kudus Dalam Angka 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia 7–15 tahun—kelompok usia wajib belajar untuk jenjang SD dan SMP—mencapai 34.917 jiwa atau sekitar 11,6% dari total penduduk Kudus. Ini merupakan kelompok sasaran utama kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun.

Distribusi usia sekolah ini tidak merata. Kecamatan Jati (5.122 anak), Kota Kudus (4.938 anak), dan Kaliwungu (4.401 anak) memiliki jumlah tertinggi, mencerminkan konsentrasi penduduk dan karakteristik urban. Sementara itu, Kecamatan Dawe dan Undaan masing-masing mencatat jumlah sekitar 3.000-an anak, namun dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang jauh berbeda, yakni dominasi wilayah perdesaan dan sektor pertanian.

Namun, besaran demografis ini harus dipertimbangkan bersama dengan profil sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029 dan data DTKS 2024, terdapat sekitar 42.917 rumah tangga miskin, di mana lebih dari 12.000 di antaranya memiliki anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga populasi anak usia sekolah di Kudus berada dalam kondisi rentan secara ekonomi, yang secara teoritis memiliki hambatan tinggi dalam mengakses pendidikan secara berkelanjutan (UNESCO Institute for Statistics, 2022; Yuniarti, 2021).

Distribusi spasial anak dari keluarga miskin menunjukkan pola yang konsisten dengan karakteristik wilayah. Kecamatan Dawe dan Undaan menempati posisi tertinggi dengan lebih dari 50% anak usia sekolah berasal dari keluarga miskin. Sebaliknya, Kota Kudus dan Bae menunjukkan angka di bawah 20%. Kesenjangan ini bukan hanya masalah angka, melainkan manifestasi dari ketimpangan struktural—baik dalam akses terhadap sumber daya pendidikan, distribusi layanan sosial, maupun kesempatan ekonomi rumah tangga.

Tabel berikut menyajikan gambaran rinci mengenai jumlah anak usia sekolah dan proporsi yang berasal dari keluarga miskin per kecamatan:

Tabel 2. Jumlah Anak Usia 7–15 Tahun dan Proporsi Anak Miskin per Kecamatan di Kabupaten Kudus (2025)

| Kecamatan  | Anak Usia 7–15 Tahun | Proporsi Anak dari Keluarga Miskin (%) |
|------------|----------------------|----------------------------------------|
| Dawe       | 3.482                | 54,3                                   |
| Undaan     | 3.164                | 51,6                                   |
| Mejobo     | 3.829                | 48,2                                   |
| Jekulo     | 4.012                | 45,1                                   |
| Gebog      | 3.872                | 42,7                                   |
| Kaliwungu  | 4.401                | 36,4                                   |
| Jati       | 5.122                | 30,8                                   |
| Bae        | 4.097                | 21,3                                   |
| Kota Kudus | 4.938                | 18,5                                   |

Sumber: BPS Kabupaten Kudus (2025); DTKS 2024; Diolah oleh peneliti (2025)

Dari data di atas tampak adanya pola korelatif awal yang cukup kuat antara konsentrasi anak miskin dan karakteristik spasial wilayah. Daerah pinggiran dengan orientasi ekonomi berbasis pertanian subsisten cenderung memiliki proporsi anak miskin yang tinggi, seperti yang terlihat di Dawe dan Undaan. Sebaliknya, wilayah urban seperti Kota Kudus dan Bae, yang memiliki struktur ekonomi lebih stabil dan akses terhadap pekerjaan formal, menunjukkan proporsi yang jauh lebih rendah.

Kondisi ini diperparah oleh profil pekerjaan kepala rumah tangga di daerah miskin yang didominasi sektor informal dan rentan. Seperti ditunjukkan oleh UNESCO (2022) dan World Bank (2021), rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan informal tanpa pendapatan tetap dan perlindungan sosial, seperti buruh tani dan ojek daring, memiliki risiko lebih tinggi terhadap keterputusan pendidikan anak karena tekanan ekonomi dan minimnya akses terhadap layanan pendukung (UNESCO, 2022; World Bank, 2021). Dengan beban ekonomi yang tinggi, pengeluaran pendidikan menjadi sekunder dibanding kebutuhan dasar lain.

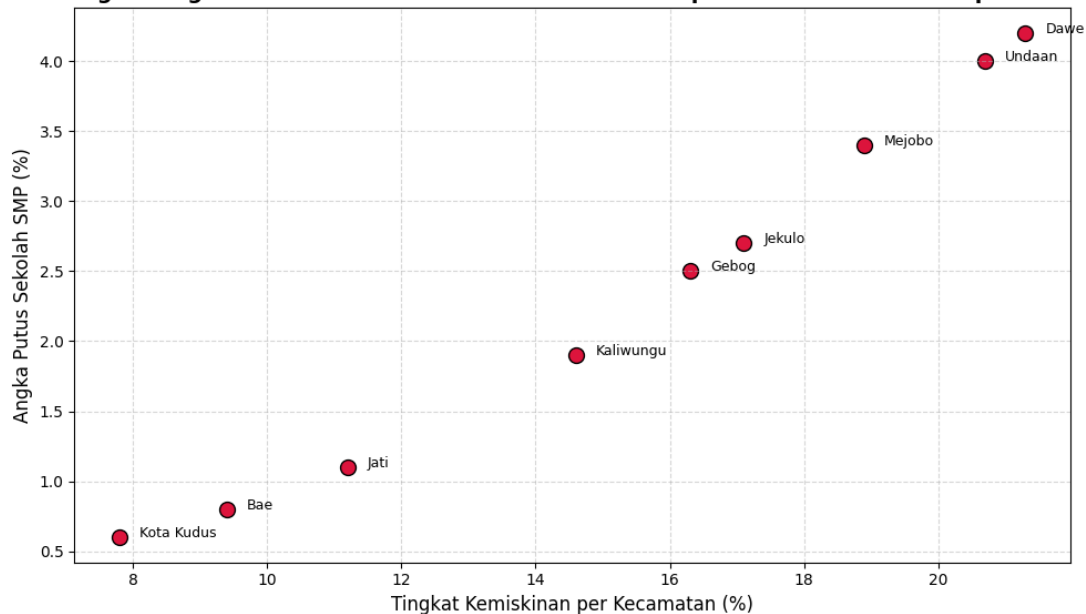
Temuan ini mendukung argumen bahwa akses dan partisipasi pendidikan anak di Kudus tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan struktural antarkecamatan. Seperti ditegaskan oleh Handayani dan Rachmawati (2020), geografi dan kemiskinan berkontribusi terhadap ketimpangan layanan dasar, termasuk pendidikan (Handayani, 2020). Ketimpangan ini menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh kebijakan pendidikan berbasis wilayah, terlebih dalam konteks target RPJMD untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP hingga 95% pada tahun 2029—sebuah ambisi yang masih jauh dari realitas di banyak wilayah rentan.

## 2. Analisis Korelasi Kemiskinan dan Putus Sekolah

Analisis korelasi dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak jenjang SMP di Kabupaten Kudus tahun 2024. Korelasi ini dihitung menggunakan teknik Pearson Product Moment, karena kedua variabel berskala interval dan distribusi data menunjukkan kecenderungan normal. Unit analisis dalam penghitungan ini adalah sembilan kecamatan yang mencerminkan keragaman sosial-ekonomi dan geografis di wilayah tersebut.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah SMP, dengan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar  $r = 0,71$  dan  $p\text{-value} = 0,034$  ( $\alpha < 0,05$ ). Dengan demikian, korelasi yang kuat dan searah ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu wilayah, maka semakin tinggi pula proporsi anak usia SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Korelasi sebesar 0,71 termasuk dalam kategori kuat menurut kriteria Guilford (1956), dan menunjukkan konsistensi dengan teori serta temuan empiris sebelumnya.

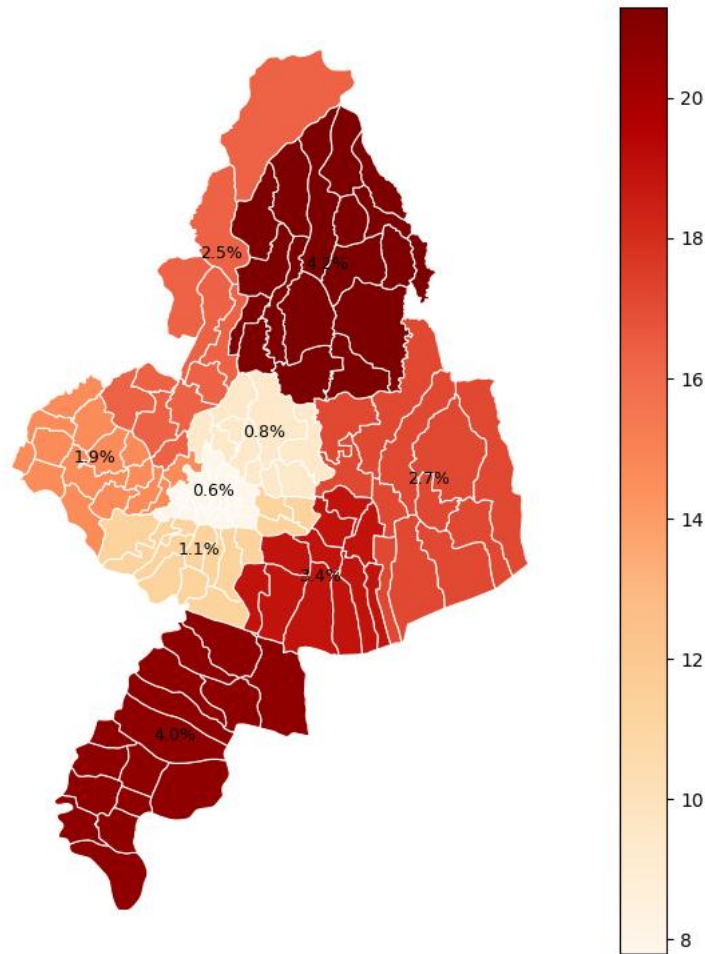
**Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah SMP per Kecamatan di Kabupaten Kudus**



**Gambar 1. Scatterplot Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah SMP per Kecamatan**

Dari scatterplot terlihat bahwa beberapa kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi—seperti Dawe dan Undaan—memiliki angka putus sekolah yang mencolok, masing-masing melebihi 4%. Sebaliknya, Kecamatan Kota Kudus dan Bae menunjukkan angka kemiskinan di bawah 10% dan tingkat putus sekolah yang juga rendah, yakni di bawah 1%. Distribusi ini tidak hanya menguatkan hasil korelasi numerik, tetapi juga memvisualisasikan kesenjangan spasial yang jelas antarwilayah.

Sebagai pelengkap dari visualisasi hubungan statistik antarvariabel, pemetaan spasial dilakukan untuk memperlihatkan distribusi geografis tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak SMP di Kabupaten Kudus. Peta ini memberikan dimensi visual tambahan yang mengungkapkan ketimpangan wilayah secara lebih eksplisit, terutama antara kawasan pusat kota dan daerah pinggiran atau perbatasan. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah yang mencolok seperti Dawe dan Undaan tampak terkonsentrasi di bagian utara dan selatan kabupaten, menunjukkan pola geografis yang signifikan. Visualisasi ini menegaskan bahwa hubungan antara kemiskinan dan putus sekolah tidak bersifat merata secara spasial, melainkan terkonsentrasi dalam zona-zona kerentanan sosial yang memerlukan perhatian kebijakan yang lebih tajam.



Gambar 2. Peta Sebaran Spasial Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah Anak SMP di Kabupaten Kudus Tahun 2024

Temuan ini mengonfirmasi hasil studi UNESCO Institute for Statistics (2022), yang menegaskan bahwa anak-anak dari rumah tangga miskin memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih tinggi untuk mengalami putus sekolah dibandingkan anak-anak dari keluarga non-miskin, terutama di wilayah dengan layanan pendidikan terbatas (UNESCO Institute for Statistics, 2022). Bahkan dalam penelitian terdahulu oleh penyebab utama putus sekolah adalah kendala ekonomi dan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan (Lestari, et al., 2020). Temuan serupa juga diperkuat oleh Yuniarti dan Santoso (2021) yang menunjukkan bahwa di Indonesia, faktor ekonomi keluarga merupakan determinan utama dalam keberlanjutan pendidikan anak, terutama di jenjang menengah pertama (Yuniarti, 2021).

Namun, penting untuk ditekankan bahwa korelasi bersifat asosiatif dan tidak menunjukkan hubungan kausal. Artinya, meskipun terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan putus sekolah, belum tentu satu menjadi penyebab langsung dari yang lain tanpa memperhitungkan faktor pengganggu seperti kualitas layanan pendidikan, tingkat partisipasi sosial, dan kondisi pekerjaan orang tua. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan terukur, hubungan linier ini dianalisis lebih lanjut melalui model regresi linier sederhana.

### 3. Model Regresi Linier dan Tafsir Kausalitas

Untuk mengukur lebih jauh sejauh mana tingkat kemiskinan memengaruhi angka putus sekolah, penelitian ini mengembangkan model regresi linier sederhana berdasarkan data agregat dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan

estimasi kuantitatif terhadap kekuatan hubungan prediktif antarvariabel, sekaligus menyediakan kerangka awal untuk memetakan risiko spasial dari ketimpangan pendidikan dasar anak.

Hasil olahan data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,502, yang berarti sekitar 50,2% variasi angka putus sekolah SMP dapat dijelaskan oleh variasi tingkat kemiskinan antarwilayah. Adapun model regresi linier yang terbentuk adalah:

$$Y=0,342X+0,91$$

Dengan:

- Y: angka putus sekolah SMP per kecamatan (%)
- X: tingkat kemiskinan per kecamatan (%)

Koefisien regresi sebesar 0,342 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat kemiskinan berkorelasi dengan peningkatan prediktif sebesar 0,342% pada angka putus sekolah. Uji signifikansi menunjukkan nilai  $p = 0,034$  ( $\alpha < 0,05$ ), sehingga hubungan ini secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Temuan ini sejalan dengan riset (Yuniarti, 2021), yang menemukan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki kontribusi besar terhadap keberlanjutan pendidikan anak, khususnya di jenjang menengah pertama di Indonesia.

Namun, model ini memiliki keterbatasan inheren. Dengan jumlah observasi yang kecil ( $n = 9$ ), generalisasi hasil bersifat terbatas dan sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Dalam konteks ilmu sosial, hal ini merupakan konsekuensi dari penggunaan data agregat wilayah kecil, yang sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman realitas individu dalam wilayah tersebut (Measuring Disparities in Education Outcomes: Regional Comparisons, 2022). Oleh karena itu, hasil regresi ini harus dibaca sebagai indikasi pola awal, bukan sebagai bukti kausalitas mutlak.

Secara strategis, model ini berperan sebagai alat baca awal untuk mengidentifikasi potensi risiko spasial dari kemiskinan terhadap partisipasi pendidikan dasar. Misalnya, dalam skenario krisis ekonomi lokal yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 3%, model ini dapat digunakan untuk memproyeksikan kemungkinan peningkatan angka putus sekolah sebesar sekitar 1,026%. Dengan demikian, model ini berfungsi sebagai simulasi prediktif yang dapat membantu pemangku kepentingan merancang intervensi berbasis bukti.

Lebih jauh, model ini juga membuka jalan bagi pembentukan indikator risiko spasial yang berguna bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Bappeda, dalam menyusun prioritas intervensi geografis. Hal ini mencakup alokasi beasiswa zonasi, penguatan layanan pendidikan di wilayah pinggiran, dan implementasi program Sekolah Layak Anak sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029.

Secara akademik, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam literatur mengenai ketimpangan pendidikan berbasis wilayah di tingkat kabupaten. Sementara sebagian besar studi sebelumnya fokus pada analisis nasional atau provinsi, penelitian ini menghadirkan perspektif mikro yang menghubungkan data spasial dan indikator sosial ekonomi pada level lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan *place-based policy analysis* yang disarankan oleh (UNESCO, 2022), di mana efektivitas kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh konteks lokal dan spesifik.

Sebagai arah pengembangan lebih lanjut, strategi riset ini dapat diperdalam dengan pendekatan longitudinal berbasis individu, penerapan analisis multilevel yang menggabungkan data rumah tangga dan spasial, serta pelengkap kualitatif berbasis komunitas. Kombinasi pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan transformatif terhadap keterkaitan antara struktur kemiskinan dan keberlanjutan pendidikan anak di tingkat akar rumput (World Bank, 2021).

#### 4. Analisis Spasial Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan dalam pendidikan dasar di Kabupaten Kudus tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi rumah tangga, tetapi juga mencerminkan disparitas spasial antarwilayah, terutama dalam hal infrastruktur pendidikan, keterjangkauan layanan publik, dan distribusi kemiskinan.

Oleh karena itu, pendekatan spasial menjadi penting untuk memahami keterputusan pendidikan sebagai fenomena sistemik yang tidak merata secara geografis.

Dalam studi ini, digunakan klasifikasi status spasial untuk menggambarkan karakteristik wilayah berdasarkan tingkat urbanisasi, akses terhadap fasilitas sosial, serta kedekatan dengan pusat pemerintahan atau ekonomi kota. Status spasial dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pendekatan BPS (2023) dan analisis wilayah fungsional:

- Perkotaan: wilayah dengan infrastruktur publik lengkap, kepadatan tinggi, dan akses transportasi memadai (misalnya Kota Kudus, Bae, Jati).
- Semi-urban: wilayah transisi antara desa dan kota, dengan keterjangkauan sedang terhadap layanan pendidikan (seperti Kaliwungu, Mejobo, Gebog, Jekulo).
- Perbatasan (*rural edge*): wilayah yang relatif terpencil, jauh dari pusat kota, dan memiliki keterbatasan layanan sosial (contohnya Dawe dan Undaan).

Pemetaan status spasial menunjukkan bahwa kecamatan dengan kategori perbatasan dan sebagian semi-urban memiliki angka kemiskinan dan putus sekolah SMP yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Berdasarkan data dari BPS, DTKS, Dinas Pendidikan, dan RPJMD Kudus, perbedaan tersebut ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Kemiskinan dan Putus Sekolah SMP Negeri per Kecamatan di Kabupaten Kudus (2024–2025)

| Kecamatan  | Kemiskinan (%) | Putus Sekolah SMP (%) | Jumlah SMP Negeri | Status Spasial |
|------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Dawe       | 21,3           | 4,2                   | 3                 | Perbatasan     |
| Undaan     | 20,7           | 4,0                   | 2                 | Perbatasan     |
| Mejobo     | 18,9           | 3,4                   | 3                 | Semi-urban     |
| Jekulo     | 17,1           | 2,7                   | 4                 | Semi-urban     |
| Gebog      | 16,3           | 2,5                   | 3                 | Semi-urban     |
| Kaliwungu  | 14,6           | 1,9                   | 3                 | Semi-urban     |
| Jati       | 11,2           | 1,1                   | 5                 | Perkotaan      |
| Bae        | 9,4            | 0,8                   | 4                 | Perkotaan      |
| Kota Kudus | 7,8            | 0,6                   | 7                 | Perkotaan      |

Sumber: BPS Kudus (2025); DTKS (2024); RPJMD Kudus 2025–2029; Dinas Pendidikan Kudus (2025)

Fokus pada SMP Negeri sebagai unit analisis dipilih karena lembaga ini merupakan indikator utama kehadiran layanan pendidikan formal yang disediakan oleh negara dan menjadi sasaran utama intervensi sosial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta beasiswa zonasi daerah rentan. Sekolah swasta di Kabupaten Kudus tidak hanya memiliki penyebaran yang tidak merata, tetapi juga menghadirkan variasi besar dalam hal biaya, kapasitas, dan kualitas, sehingga berisiko menghasilkan bias struktural jika digunakan sebagai pembanding utama.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah SMP Negeri cenderung lebih sedikit di wilayah perbatasan, seperti Dawe dan Undaan, dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Kudus. Hal ini menciptakan hambatan geografis dalam akses pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Temuan ini sejalan dengan studi Banerjee et al. (2017), yang menegaskan bahwa ketimpangan akses geografis terhadap layanan publik seperti pendidikan merupakan determinan kuat dari eksklusi anak dari sistem pendidikan formal di negara berkembang (Banerjee, 2017).

Secara struktural, ketimpangan ini merupakan hasil dari akumulasi keterisolasian geografis, rendahnya infrastruktur sosial, dan tekanan ekonomi rumah tangga. Anak-anak di wilayah miskin dan terpencil menghadapi biaya tidak langsung yang lebih tinggi untuk dapat bersekolah, seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan hilangnya potensi pendapatan rumah

tangga. World Bank (2021) menegaskan bahwa interaksi antara dimensi ekonomi dan geografis menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan pendidikan dasar di wilayah dengan ketimpangan tinggi (World Bank, 2021).

Dampak dari ketimpangan spasial ini tidak hanya terbatas pada prestasi akademik, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak, seperti pernikahan dini, pekerja anak, dan pengabaian pendidikan (Out-of-School Children: Risks and Vulnerabilities in Rural Asia, 2023). Karena itu, identifikasi wilayah rawan secara spasial merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penajaman intervensi kebijakan, baik untuk perlindungan sosial maupun pengembangan pendidikan inklusif.

Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029 telah mengadopsi pendekatan spasial, dengan menggarisbawahi program-program seperti beasiswa zonasi untuk daerah rawan, penguatan kapasitas SMP Negeri, dan pengembangan Sekolah Layak Anak. Temuan dalam studi ini dapat menjadi dasar argumen teknokratik dan bukti kuantitatif bagi pemangku kebijakan dalam merancang intervensi yang lebih presisi dan partisipatif pada wilayah yang paling terdampak ketimpangan pendidikan.

## **5. Tinjauan Kritis terhadap Efektivitas Intervensi Sosial**

Selama dua dekade terakhir, Kabupaten Kudus telah menjadi salah satu wilayah yang menerima berbagai bentuk intervensi sosial nasional maupun daerah secara cukup intensif, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan partisipasi pendidikan anak. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa zonasi berbasis APBD, serta pengembangan Sekolah Layak Anak telah menjadi komponen penting dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025–2029. Namun, temuan studi ini memunculkan pertanyaan mendasar: *Sejauh mana intervensi tersebut benar-benar efektif dalam menurunkan angka putus sekolah secara spasial?*

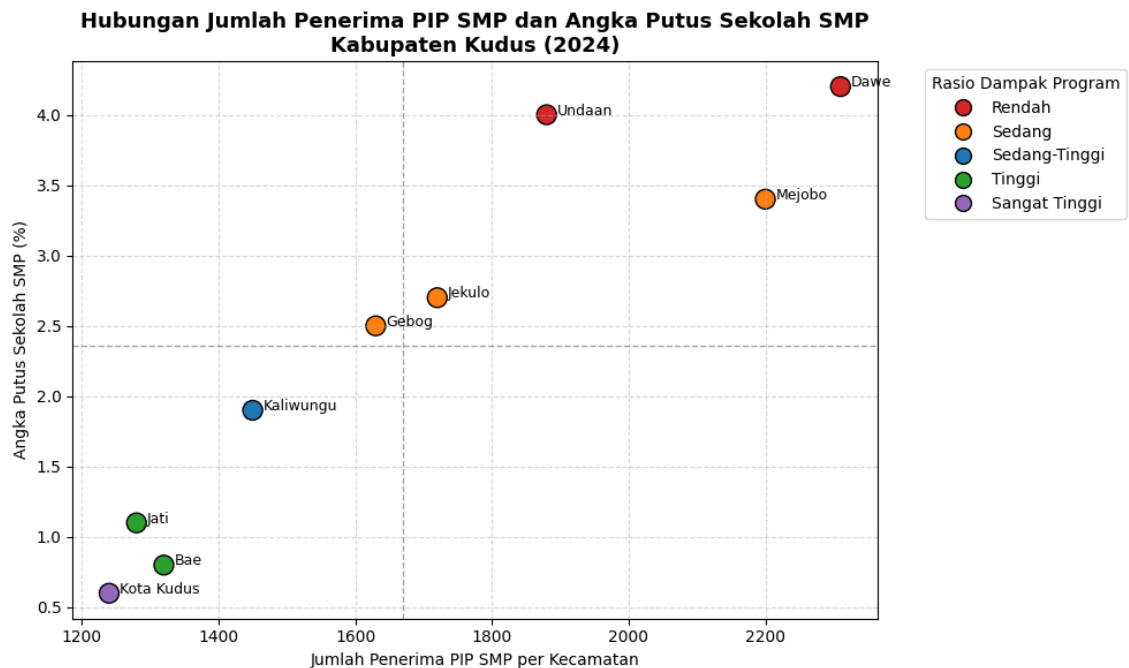
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Penerima PIP  
dan Putus Sekolah SMP per Kecamatan (2024–2025)

| Kecamatan  | Penerima PIP<br>SMP | Putus Sekolah<br>SMP (%) | Rasio Dampak<br>Program* | Catatan Evaluatif                          |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Dawe       | 2.310               | 4,2                      | Rendah                   | Tinggi bantuan,<br>dropout tetap tinggi    |
| Undaan     | 1.880               | 4,0                      | Rendah                   | Tantangan geografis<br>berat               |
| Mejobo     | 2.200               | 3,4                      | Sedang                   | Akses sekolah terbatas                     |
| Jekulo     | 1.720               | 2,7                      | Sedang                   | Kebutuhan<br>pendampingan sosial<br>tinggi |
| Gebog      | 1.630               | 2,5                      | Sedang                   | Kondisi rumah tangga<br>rentan             |
| Kaliwungu  | 1.450               | 1,9                      | Sedang-Tinggi            | Penurunan dropout<br>mulai terlihat        |
| Jati       | 1.280               | 1,1                      | Tinggi                   | Dukungan komunitas<br>kuat                 |
| Bae        | 1.320               | 0,8                      | Tinggi                   | Inklusi sosial baik,<br>kontrol masyarakat |
| Kota Kudus | 1.240               | 0,6                      | Sangat Tinggi            | Aksesibilitas dan<br>literasi tinggi       |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kudus (2025); PUSDATIN Kemendikbudristek (2024); DTKS (2024)*

*\*Rasio dampak program diestimasi dari tren penurunan angka putus sekolah relatif terhadap distribusi bantuan*

Studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara distribusi bantuan dan penurunan angka putus sekolah tidak selalu linier. Sebagai contoh, Kecamatan Dawe dan Undaan yang merupakan wilayah dengan jumlah penerima PIP tertinggi ternyata tetap mencatat angka putus sekolah di atas 4%. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara cakupan administratif program (*coverage*) dan pencapaian dampaknya secara nyata (*impact*) di lapangan.



Gambar 3. Scatterplot Hubungan Jumlah Penerima PIP SMP dan Angka Putus Sekolah SMP per Kecamatan di Kabupaten Kudus (2024)

Grafik tersebut memperlihatkan hubungan antara jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang SMP dan tingkat putus sekolah per kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2024. Terlihat bahwa beberapa kecamatan dengan penerima PIP yang tinggi—seperti Dawe dan Undaan—justru memiliki tingkat putus sekolah yang juga tinggi, yang menunjukkan bahwa distribusi bantuan belum cukup efektif dalam menekan angka *dropout*, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial struktural. Situasi ini menggambarkan ketidaksesuaian antara rancangan program dan kebutuhan lokal anak-anak di wilayah miskin dan terpencil.

Temuan empiris yang telah diuraikan sebelumnya melalui Gambar 3 dan Tabel 4 mengindikasikan bahwa cakupan intervensi sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) tidak selalu berkorelasi langsung dengan penurunan angka putus sekolah. Meskipun beberapa kecamatan telah menerima distribusi bantuan secara substansial, tingkat putus sekolah tetap tinggi. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara desain program dan dinamika lokal yang memengaruhi keberhasilan intervensi.

Untuk memahami mengapa program bantuan ini belum mampu menurunkan angka putus sekolah secara signifikan di beberapa wilayah, studi ini mengidentifikasi empat faktor kunci yang menjadi akar persoalan efektivitas. Keempat faktor ini berkaitan erat dengan kelemahan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial, baik dari sisi data, pelibatan masyarakat, maupun desain spasial program. Penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

a. Validitas Targeting Program Masih Menjadi Masalah

Penyaluran bantuan pendidikan seperti PIP dan PKH sangat bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meski DTKS dimaksudkan untuk menyasar rumah tangga miskin, risiko kesalahan penargetan masih tinggi. Studi Sari & Wulandari (2020) menemukan bahwa *inclusion error* dan *exclusion error* masih terjadi secara signifikan, terutama di wilayah rural. *Inclusion error* terjadi ketika keluarga mampu justru menerima bantuan, sementara *exclusion error* mengakibatkan keluarga miskin yang layak tidak terdata. Kelemahan ini melemahkan presisi intervensi secara spasial maupun sosial, membuat program menjadi kurang berdampak di lokasi yang paling membutuhkan.

b. Intervensi Tidak Didukung oleh Layanan Pendukung

Sebagian besar program pendidikan bersifat tunai (*cash transfer*), tanpa disertai dukungan sistemik seperti pendampingan sosial, penyediaan transportasi anak sekolah,

penguatan peran komunitas sekolah, atau penyediaan konselor anak. Padahal, studi World Bank (2021) menegaskan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan meningkat tajam ketika dikombinasikan dengan layanan non-finansial (World Bank, 2021). Anak-anak di daerah seperti Dawe masih harus menempuh perjalanan jauh untuk sekolah, yang sering kali menjadi alasan utama mereka berhenti sekolah, meskipun mereka tercatat sebagai penerima bantuan.

c. Partisipasi Masyarakat Masih Terbatas

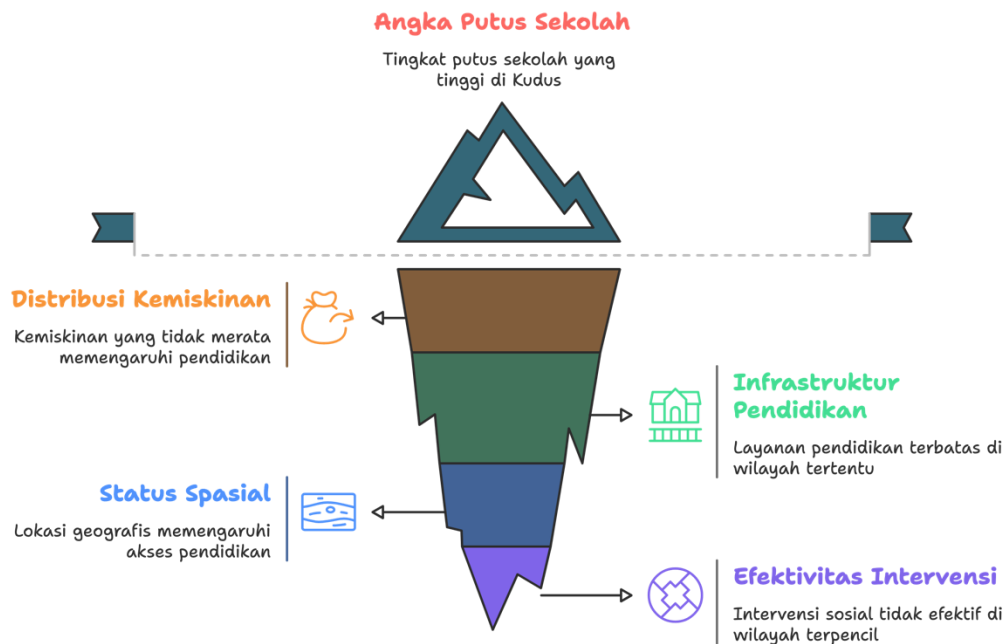
Dalam konteks Kudus, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih rendah. Studi Mulyadi & Nurkholis (2022) menunjukkan bahwa banyak keluarga penerima PKH atau PIP tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam program (A. Mulyadi & Nurkholis, M., 2022). Minimnya sosialisasi, literasi digital yang rendah, serta tidak optimalnya peran kader lokal menyebabkan kesenjangan komunikasi dan implementasi di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pendidikan.

d. Ketiadaan Dimensi Spasial dalam Desain Program

Salah satu temuan paling penting dari studi ini adalah ketidakterlibatan dimensi spasial dalam desain dan pelaksanaan program sosial nasional. Sebagian besar program masih bersifat seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan geografis, ketersediaan layanan, dan tingkat keterisolasian antarwilayah. Padahal, hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi geografis sangat memengaruhi risiko putus sekolah. Daerah perbatasan dan semi-urban seperti Dawe, Undaan, dan Mejobo menunjukkan angka putus sekolah yang tinggi meski menerima intervensi signifikan. RPJMD Kudus 2025–2029 telah menginisiasi zonasi afirmatif dan sekolah layak anak sebagai langkah awal, namun implementasi dan sistem pemantauan berbasis spasial masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap risiko lokal.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak SMP di Kabupaten Kudus bukan sekadar korelasi statistik yang umum ditemukan dalam studi sebelumnya, tetapi menunjukkan pola spasial yang tajam antarwilayah, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam desain kebijakan sosial daerah. Salah satu kebaruan penting dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan spasial antar-kecamatan yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh distribusi geografis kemiskinan, infrastruktur pendidikan, dan status spasial wilayah, seperti pada Gambar 4. Korelasi positif yang signifikan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah ( $r = 0,71$ ;  $p < 0,05$ ), serta hasil regresi linier yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% variasi angka putus sekolah dijelaskan oleh kemiskinan ( $R^2 = 0,502$ ), bukan hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya tetapi juga memperkuat urgensi pendekatan wilayah dalam membaca kerentanan pendidikan anak. Dengan mengintegrasikan klasifikasi spasial menjadi perkotaan, semi-urban, dan perbatasan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual bahwa wilayah-wilayah seperti Dawe dan Undaan mengalami tekanan struktural yang berlapis: kemiskinan tinggi, layanan pendidikan terbatas, dan minimnya akses transportasi. Kebaruan lain yang diangkat adalah evaluasi kritis terhadap efektivitas intervensi sosial yang telah berjalan, seperti PKH dan PIP, yang secara administratif mencakup banyak sasaran, tetapi secara empiris tidak mampu mengatasi dropout di wilayah-wilayah dengan hambatan geografis tinggi. Pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan pembacaan spasial ini menghasilkan model awal yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki daya guna strategis dalam mendesain sistem perlindungan anak berbasis wilayah rawan pendidikan, sebuah perspektif yang belum banyak dikembangkan di tingkat kabupaten. Dengan demikian, riset ini membuka ruang bagi reformulasi kebijakan pendidikan anak yang tidak hanya fokus pada aspek individual dan keluarga, tetapi juga memperhitungkan struktur spasial dan ketimpangan geografis dalam distribusi hak pendidikan dasar.

## Kemiskinan dan Putus Sekolah: Pola Spasial yang Tersembunyi



Gambar 4. Pola Spasial Struktural Putus Sekolah di Kabupaten Kudus

### SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan secara jelas bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kudus. Hasil analisis kuantitatif melalui korelasi Pearson memperlihatkan hubungan positif yang kuat antara kedua variabel, dengan koefisien sebesar  $r = 0,71$  dan signifikansi  $p < 0,05$ , menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu kecamatan, maka semakin besar pula kemungkinan anak-anak di wilayah tersebut tidak melanjutkan pendidikan dasar hingga selesai. Temuan ini diperkuat oleh hasil regresi linier sederhana yang menunjukkan bahwa sebesar 50,2% variasi angka putus sekolah dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan antarwilayah, dengan nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,502$ . Hasil ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa struktur sosial ekonomi rumah tangga dan konteks geografis sangat mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak (Umar & Wicaksono, 2021; UNESCO, 2022).

Namun demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan spasial-kuantitatif yang digunakan untuk mengungkap ketimpangan tersembunyi antarwilayah di tingkat kabupaten. Dengan mengintegrasikan data sosial ekonomi, status spasial, dan infrastruktur pendidikan, studi ini tidak hanya memperlihatkan pola ketimpangan statistik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana distribusi kemiskinan yang tidak merata—terutama di wilayah perbatasan seperti Dawe dan Undaan—berinteraksi dengan rendahnya layanan pendidikan dan inefektivitas program intervensi. Konteks spasial ini memperkaya pemahaman mengenai keterputusan pendidikan anak sebagai sebuah gejala struktural, bukan semata persoalan keluarga atau individu.

Secara reflektif, studi ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara cakupan administratif program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Sekolah Layak Anak, dengan dampak empirisnya di lapangan. Banyak wilayah dengan alokasi bantuan tinggi tetap mencatat angka putus sekolah yang tinggi, mengindikasikan lemahnya desain program dalam menjawab realitas lokal yang kompleks.

Masalah validitas data DTKS, tidak adanya layanan pendukung non-finansial, dan partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penentu lemahnya efektivitas program.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan hasil kuantitatif, tetapi juga menyumbangkan sebuah kerangka evaluatif untuk melihat persoalan pendidikan anak dalam konteks spasial dan struktural. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam reformulasi kebijakan daerah yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berkeadilan spasial dalam upaya mengurangi angka putus sekolah secara berkelanjutan.

## **SARAN**

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak di Kabupaten Kudus tidak sekadar bersifat statistik, melainkan mencerminkan ketimpangan struktural dan spasial yang belum secara optimal dijawab oleh berbagai program intervensi sosial yang ada. Oleh karena itu, strategi perlindungan pendidikan anak ke depan harus berpijak pada pendekatan berbasis peta risiko spasial dan sosial secara integratif, bukan hanya pendekatan administratif-konvensional.

Pemerintah Kabupaten Kudus—khususnya Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial—perlu mulai mengintegrasikan zonasi wilayah rawan putus sekolah sebagai dasar prioritas program afirmatif. Instrumen seperti alokasi beasiswa berbasis zonasi, pembangunan Sekolah Layak Anak di daerah pinggiran, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan negeri di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas kebijakan spasial. Langkah ini penting untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah dan mengarahkan sumber daya publik kepada kelompok anak yang paling rentan terhadap eksklusi pendidikan.

Reformulasi program sosial seperti PIP dan PKH juga perlu dilakukan dengan paradigma holistik. Bantuan tunai perlu dikombinasikan dengan layanan non-finansial seperti penyediaan transportasi sekolah, konseling keluarga miskin, dan program literasi sosial yang menjangkau orang tua di wilayah terpencil. Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data dan pemahaman penerima terhadap manfaat program. Untuk itu, verifikasi dan pemutakhiran data DTKS harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, sekolah, dan komunitas lokal guna meminimalkan *inclusion* dan *exclusion error*.

Lebih jauh, perlu dibentuk forum koordinasi lintas sektor di tingkat daerah yang secara khusus menangani isu pendidikan anak dari keluarga rentan dengan pendekatan spasial. Forum ini dapat mengintegrasikan data, menyusun indikator risiko pendidikan, memantau efektivitas intervensi, dan menyinkronkan perencanaan antarinstansi dalam dokumen RPJMD dan renstra teknis. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah tidak hanya akan bertumpu pada serapan anggaran atau jumlah penerima bantuan, tetapi pada efektivitas spasial program dan hasil sosial yang terukur.

Sebagai kontribusi strategis, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur akademik tentang ketimpangan pendidikan, tetapi juga dapat digunakan sebagai rujukan teknokratik dalam desain kebijakan perlindungan anak berbasis wilayah. Dengan menempatkan keadilan spasial sebagai perspektif utama dalam distribusi sumber daya pendidikan, Kabupaten Kudus memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pendidikan dasar yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan fasilitasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus, terutama kepada Ibu Sulistiyowati, S.T., M.EM. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Kudus, dan Amalia, S.H., M.Ec.Dev. selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Kabupaten Kudus, atas keterbukaan dan dukungan penuh terhadap riset yang berfokus pada ketimpangan spasial dan perlindungan pendidikan anak ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Dinas Pendidikan, serta pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah memberikan akses terhadap data dan informasi yang menjadi tulang punggung dalam analisis kuantitatif dan spasial dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi data dari lembaga-lembaga tersebut, pemetaan risiko dan rekomendasi kebijakan tidak dapat disusun secara komprehensif dan kontekstual.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dr. Indra Kertati, M.Si., dan Prof. Dr. Ars. Eko Nursanty yang telah berperan sebagai mentor akademik dan pengarah metodologis, serta memberikan bimbingan yang sangat bernilai dalam penyusunan desain riset, pembacaan konteks spasial, serta penajaman temuan dalam konteks kebijakan perlindungan sosial anak.

Penulis juga mengapresiasi literatur dan temuan dari para peneliti terdahulu, serta lembaga internasional seperti UNESCO dan World Bank, yang telah memberikan landasan teoretis dan pembandingan empiris dalam menjelaskan keterkaitan antara kemiskinan, lokasi geografis, dan kelangsungan pendidikan anak.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan moral, masukan ilmiah, serta ruang diskusi selama proses penelitian berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi strategis, tidak hanya bagi pengembangan kebijakan berbasis data dan spasial di Kabupaten Kudus, tetapi juga memperkuat komitmen kolektif dalam menjamin hak pendidikan anak secara berkeadilan dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2025). *Kudus dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Kudus. <https://kuduskab.bps.go.id/publication/>
- Banerjee, A., Duflo, E. ., & Kremer, M. (2017). The role of access in the education of the poor. *Quarterly Journal of Economics*, 132(2), 785–847. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx010>
- Budi Lestari, A. Y., Kurniawan, F., & Ardi, R. B. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299–308. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.24470>
- Handayani, L. R., Rina. (2020). Spatial inequality and access to basic education in Indonesia. *GeoJournal of Regional Development*, 42(3), 189–205. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10213-z>
- Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh pdrb, angka harapan hidup, Dan rata rata lama sekolah terhadap kemiskinan Di kabupaten/Kota provinsi jawa tengah tahun 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2959-2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Measuring disparities in education outcomes: Regional comparisons*. (2022). OECD. <https://www.oecd.org/education/measuring-disparities-2022.pdf>
- Mulyadi, A., & Nurkholis, M. (2022). Partisipasi Keluarga dalam Program Bantuan Pendidikan di Kudus. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 17(2), 111–126. <https://doi.org/10.31227/osf.io/fq3mz>
- Mulyadi, M. ; N., M. (2022). Program Keluarga Harapan dan perilaku sekolah anak miskin: Studi di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(1), 59–70. <https://doi.org/10.14710/jiks.21.1.59-70>
- Nita, A., Motoi, G., & Ilie Goga, C. (2021). School dropout determinants in rural communities: The effect of poverty and family characteristics. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 74, 19-32. <https://doi.org/10.33788/rcis.74.2>
- Out-of-school children: Risks and vulnerabilities in rural Asia*. (2023). UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/out-of-school-children-asia>
- Sari, N. W. ; W., F. (2020). The impact of the Indonesia Smart Card (KIP) program on students' dropout risk in rural areas. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 35–47. <https://doi.org/10.21831/jppm.v7i1.30765>

- Umar, F., & Wicaksono, A. (2021). Ketimpangan Pendidikan dan Akses Sosial Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Pembangunan*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.31227/osf.io/y27mz>
- UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report: Leave No Child Behind. *UNESCO Publishing*. <https://doi.org/10.54675/unesco-gem-2022>
- UNESCO Institute for Statistics. (2022). Leaving no one behind: How poverty increases dropout risks in developing countries. *International Journal of Educational Development*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102600>
- World Bank. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. *World Bank Publications*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>
- Yuniarti, T. ; S., D. (2021). The impact of social protection programs on school attendance in Indonesia. *Journal of Social Policy and Education*, 13(1), 45–62. <https://doi.org/10.1016/j.jsped.2021.01.004>